

RENSTRA

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**



2025-2029

Kabupaten Asmat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 31 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Asmat.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat dalam Penyusunan Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai dokumen rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

Akhirnya diharapkan Renstra ini dapat menjadi pedoman kerja bagi seluruh staf di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat pada khususnya dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Asmat pada Umumnya.

Agats, 18 Juli 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Asmat

YESAYA AIRO, S.SOS

NIP. 198003272006051001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	32
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	61
2.1.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	74
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	75
2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	76
2.2.1 Identifikasi Permasalahn berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	76
2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	80
2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota ...	82
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	86
2.2.5 Penentuan Isu-isu Strategis	88
BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	92
3.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ...	93
3.1.2. Cascading Kinerja Perangkat Daerah	95
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	97
BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah	99
4.1.1 Gambaran Umum Program dan Kegiatan	99
4.1.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	101
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah	105
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	114
4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	133
4.2.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)	134
4.2.4 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals	136
BAB V Penutup	138

BAB

1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) yang salah satunya adalah Propinsi Papua Selatan melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 menjadi langkah yang strategis untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua yang diharapkan dapat memberikan dampak yang positif pada pendidikan, kesehatan dan tata kelola pemerintahan serta mendorong kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Papua dan yang paling utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia Papua yang akan memegang peran penting pada pembangunan Papua dimasa depan.

Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan tercapainya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Renstra merupakan Dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arah, yang digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan yang baik dan terarah.

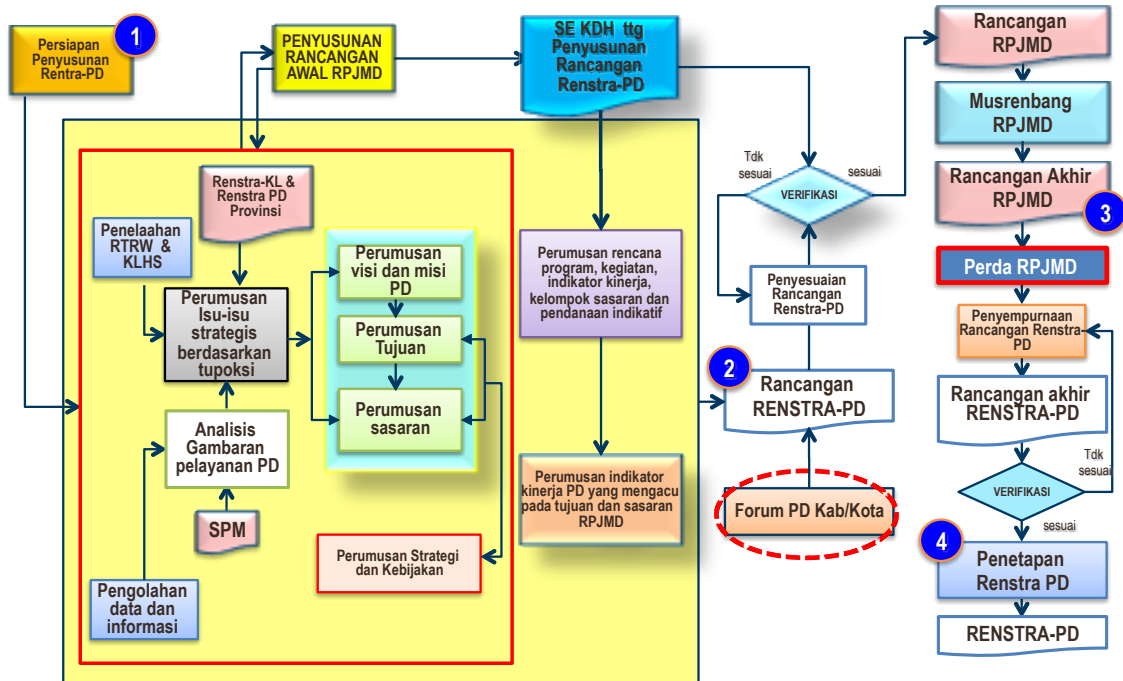
Agar penyusunan perencanaan pembangunan dapat menjamin tercapainya tujuan negara maka diperlukan adanya system perencanaan pembangunan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah sebagai suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah (UU No. 25 tahun 2004).

Di daerah, dokumen perencanaan harus dilaksanakan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah) yakni dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Daerah) yakni untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Renstra – OPD pada prinsipnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun dengan tugas pokok dan fungsi OPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 dapat tercapai serta kinerja dan pelaporan akuntabilitas dapat terukur selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan daerah. Sedangkan Proses penyusunan Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat terkait dengan sistem perencanaan pembangunan daerah mengikuti pola sebagai berikut:

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra PD



Sumber : Bahan Presentasi Kemendagri 2018

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat tahun 2025-2029, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara RI nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang –Undang;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Propinsi Papua Selatan
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 5587, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah pula dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
18. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD RPJMD dan RKPD;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 ttg Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat;
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;

27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Asmat.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
30. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 31 tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat Periode Tahun 2025-2029 setelah ditetapkannya RPJMD Kabupaten Asmat tahun 2025-2029.

1.3.2. Tujuan

Adapun Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat ini adalah :

- 1) Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas dalam berbagai bidang tugas selama periode tahun 2025-2029.
- 2) Mempermudah pengendalian program serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.2.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 2.2.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
 - 2.2.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

3.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.1.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

4.2.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

4.2.4 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/
Sustainable Development Goals

BAB V PENUTUP

BAB

2

**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMANKABUPATEN ASMAT**

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

**2.1.1. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**2.1.1.1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pembinaan administrasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air dan penataan ruang.

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Melaksanakan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, unit kerja terkait, instansi vertical dan organisasi non pemerintah;

Membina, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

1) Menyusun telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas lingkup kesekretariatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang lingkup dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program serta penatausahaan keuangan;
- b. Pengkajian rencana dan program kerja penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program serta penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program serta penatausahaan keuangan;
- d. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dengan satuan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang lingkup dinas;
- f. Penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan teknis kepada atasan;
- g. Pengendalian dan pembinaan administrasi teknis penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program serta penatausahaan keuangan;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan di bidang umum dan kepegawaian, penyusunan program serta penatausahaan keuangan;

- i. Pembinaan dan evaluasi kinerja sub-sub bagian di lingkup kesekretariatan;
- j. Pembinaan dan penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sekretariat dinas terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Program; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian;
- b. Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian;
- d. Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian;
- e. Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- f. Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub Bagian Program mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang penyusunan program.

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyusunan program;
- b. Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penyusunan program;
- c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penyusunan program;
- d. Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penyusunan program;
- e. Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- f. Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang penatausahaan keuangan.

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- b. Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan;
- c. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- d. Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- e. Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- f. Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;

- g. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang bina marga yang meliputi perencanaan dan pengawasan teknik, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian rencana dan program kerja penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. Pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dengan satuan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. Penyusunan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pemerintah daerah di bidang bina marga;
- g. Pengendalian dan pembinaan administrasi teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. Pembinaan dan evaluasi kinerja seksi di lingkup Bidang Bina Marga;
- j. Pembinaan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Bina Marga terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik;
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif dibidang perencanaan dan pengawasan teknik.

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan teknik;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan teknik;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan teknik;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan teknik;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang pembangunan jalan dan jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan jembatan;

- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan

urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang cipta karya yang meliputi perencanaan dan pengawasan teknik, pengembangan sistem penyediaan air bersih dan bina konstruksi.

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian rencana dan program kerja penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pengembangan sistem penyediaan air bersih dan bina konstruksi;
- b. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pengembangan sistem penyediaan air bersih dan bina konstruksi;
- c. Pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pengembangan sistem penyediaan air bersih dan bina konstruksi;
- d. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dengan satuan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. Penyusunan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pemerintah daerah di bidang cipta karya;
- g. Pengendalian dan pembinaan administrasi teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pengembangan sistem penyediaan air bersih dan bina konstruksi;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan pengawasan teknik, pengembangan sistem penyediaan air bersih dan bina konstruksi;
- i. Pembinaan dan evaluasi kinerja seksi di lingkup Bidang Cipta Karya;
- j. Pembinaan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Cipta Karya terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan pengendalian Bangunan dan Pemukiman
- b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih; dan
- c. Seksi Bina Konstruksi.

a. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Pemukiman mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian bangunan dan pemukiman.

Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Pemukiman dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Pemukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan bidang guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Pemukiman sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- 5) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Pemukiman agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 6) Melaksanakan pembinaan di bidang perencanaan, pengawasan dan pengendalian bangunan dan pemukiman, penyelenggaraan ijin mendirikan bangunan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Pemukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 9) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif pengembangan sistem penyediaan air bersih.

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengembangan sistem penyediaan air bersih;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air bersih;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air bersih;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air bersih;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Seksi Bina Konstruksi mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif dibidang bina konstruksi.

Seksi Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan bina konstruksi;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan bina konstruksi;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan bina konstruksi;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan bina konstruksi;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan dan pengawasan teknik, sungai, pantai dan pengendalian air baku serta irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan.

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian rencana dan program kerja penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan dan pengawasan teknik, sungai, pantai dan pengendalian air baku serta irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan;
- b. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan dan pengawasan teknik, sungai, pantai dan pengendalian air baku serta irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan;
- c. Pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan dan pengawasan teknik, sungai, pantai dan pengendalian air baku serta irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan;
- d. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dengan satuan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. Penyusunan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pemerintah daerah dibidang sumber daya air;
- g. Pengendalian dan pembinaan administrasi teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan dan pengawasan teknik, sungai, pantai dan pengendalian air baku serta irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air yang meliputi perencanaan dan pengawasan teknik, sungai, pantai dan pengendalian air baku serta irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan;
- i. Pembinaan dan evaluasi kinerja seksi di lingkup Sumber Daya Air;

- j. Pembinaan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik;
- b. Seksi Sungai, Pantai dan Pengendalian Air Baku; dan
- c. Seksi Irigasi, Rawa, Operasi dan Pemeliharaan.

a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang perencanaan dan pengawasan teknik.

Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan teknik;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan teknik;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan teknik;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perencanaan dan pengawasan teknik;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Seksi Sungai, Pantai dan Pengendalian Air Baku mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif dibidang sungai, pantai dan pengendalian air baku.

Seksi Sungai, Pantai dan Pengendalian Air Baku dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pemanfaatan sungai, pantai dan pengendalian air baku;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan sungai, pantai dan pengendalian air baku;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan sungai, pantai dan pengendalian air baku;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemanfaatan sungai, pantai dan pengendalian air baku;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Seksi Irigasi, Rawa, Operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan.

Seksi Irigasi, Rawa, Operasi dan Pemeliharaan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan irigasi, rawa, operasi dan pemeliharaan;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di bidang penataan ruang yang meliputi penyusunan tata ruang, penataan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang.

Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian rencana dan program kerja penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang yang meliputi penyusunan tata ruang, penataan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- b. Pengkajian bahan kebijakan teknis dan perumusan bahan kebijakan umum penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang yang meliputi penyusunan tata ruang, penataan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- c. Pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang yang meliputi penyusunan tata ruang, penataan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- d. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas dengan satuan perangkat daerah terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis kepada atasan;
- f. Penyusunan telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang;
- g. Pengendalian dan pembinaan administrasi teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang yang meliputi penyusunan tata ruang, penataan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- h. Pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang penataan ruang yang meliputi penyusunan tata ruang, penataan dan pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- i. Pembinaan dan evaluasi kinerja seksi di lingkup Penataan Ruang;
- j. Pembinaan dan penilaian terhadap kinerja bawahan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Penataan Ruang terdiri atas :

- a. Seksi Penyusunan Tata Ruang;
- b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.

a. Seksi Penyusunan Tata Ruang mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang penyusunan tata ruang.

Seksi Penyusunan Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyusunan tata ruang.;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penyusunan tata ruang.;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penyusunan tata ruang.;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penyusunan tata ruang.;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang penataan dan pemanfaatan ruang.

Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penataan dan pemanfaatan ruang;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan ruang;

- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan ruang;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemanfaatan ruang;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang pengendalian dan pengawasan tata ruang. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan, pedoman, kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- 2) Pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- 3) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- 4) Penyusunan konsep kebijakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tata ruang;
- 5) Penyiapan data, bahan dan informasi sebagai bahan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan;
- 6) Pendistribusian pelaksanaan tugas, pembinaan dan penilaian kinerja bawahan;
- 7) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, pengkoordinasian, pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi perencanaan dan penyediaan perumahan, penyediaan perumahan formal dan swadaya, sanitasi, penyehatan lingkungan serta

evaluasi pembangunan perumahan rakyat. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja dinas guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- e. Memverifikasi konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- f. Mengarahkan pelaksanaan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Daerah;
- g. Merumuskan bahan pemberian rekomendasi Pembangunan dan fasilitasi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dalam perencanaan, Pembangunan, pemanfaatan, pengendalian perumahan;
- i. Melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dalam penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan, rumah susun umum atau rumah khusus;
- j. Melaksanakan kebijakan dan rekomendasi dalam penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- k. Melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana, pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana;
- l. Melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dalam perencanaan, pemantauan kawasan permukiman;
- m. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh, penataan kawasan permukiman khusus, kawasan permukiman perbatasan, dan pulau terluar;

- n. Melaksanakan pengembangan pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan lokal dan peningkatan kualitas permukiman;
- o. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- p. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- q. Mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

- a. Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya;
 - b. Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan.
- a. Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang penyediaan perumahan rakyat, formal dan swadaya.

Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan bidang Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- 4) Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- 5) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 6) Melaksanakan pembinaan di bidang fasilitasi, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pada bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 9) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang sanitasi dan penyehatan lingkungan.

Seksi Sanitasi dan Penyehatan melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan bidang Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- 4) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 5) Melaksanakan pembinaan di bidang fasilitasi, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pada bidang Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
- 6) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal dan Swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- 7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 8) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan mempunyai tugas menelaah, menganalisis, menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis operasional dan administratif di bidang pengembangan sumber daya kelistrikan.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi di lingkungan bidang Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan guna terwujud sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) Menyusun konsep kebijakan teknis, petunjuk pelaksanaan dan naskah dinas lingkup Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

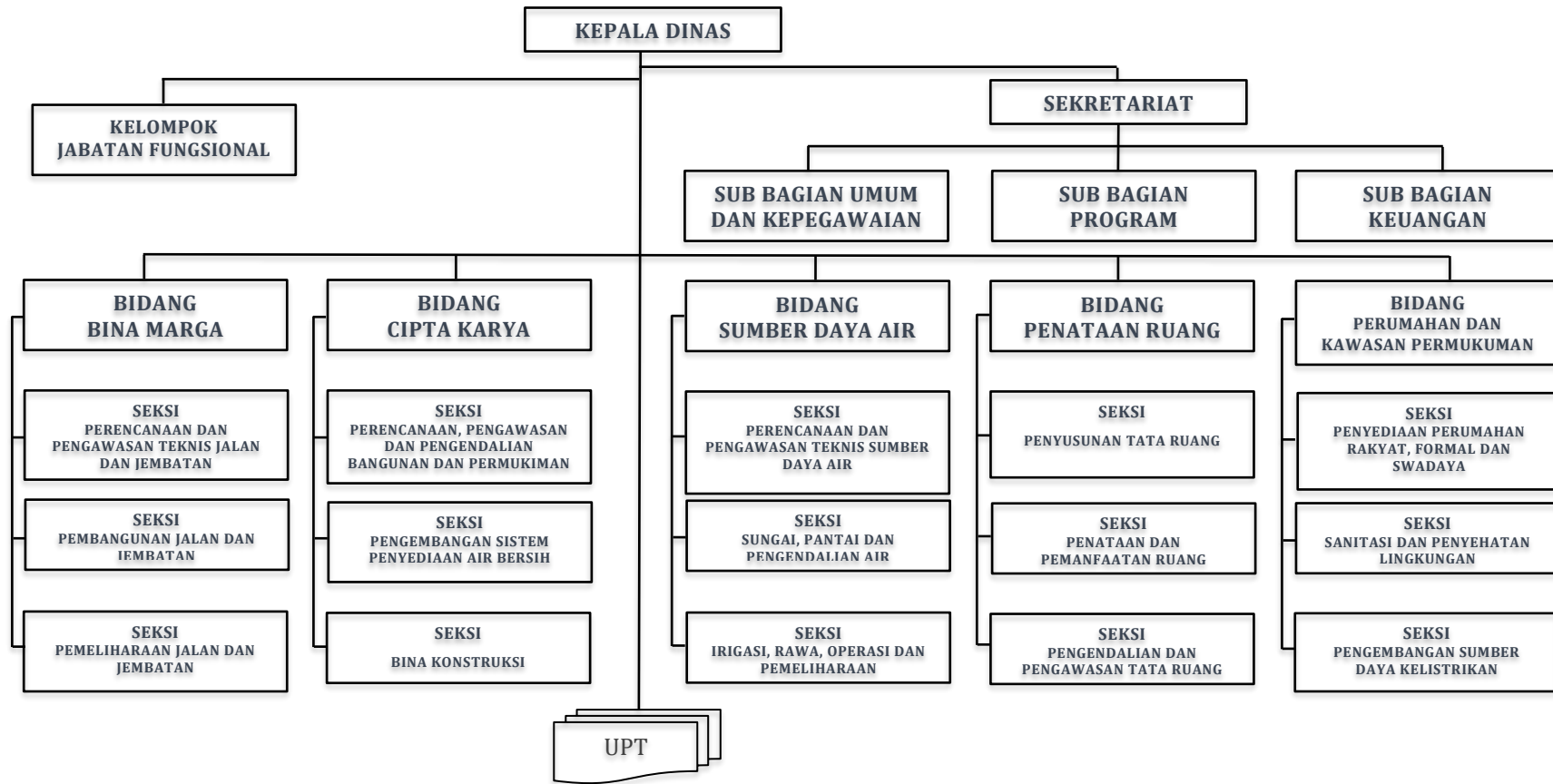
- 5) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- 6) Melaksanakan pembinaan di bidang fasilitasi, evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pada bidang Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan;
- 7) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kegiatan dapat berjalan lancar;
- 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
- 9) Melaksanakan penilaian kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk meningkatkan prestasi kerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Asmat Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat disebutkan bahwa susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program
3. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
4. Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Pemukiman
 - b. Seksi pengembangan Sistem Penyediaan Air Bersih;
 - c. Seksi Bina Konstruksi.
5. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
- a. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Sumber Daya Air;
 - b. Seksi Sungai, Pantai dan Pengendalian Air Baku;
 - c. Seksi Irigasi, Rawa, Operasi dan Pemeliharaan.
6. Bidang Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Seksi Penyusunan Tata Ruang;
 - b. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang.
7. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
- a. Seksi Penyediaan Perumahan Rakyat, Formal, dan Swadaya;
 - b. Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan;
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Kelistrikan.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat

2.1.2. SUMBER DAYA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia aparatur yang cukup dan handal sesuai dengan kompetensi keilmuan, khususnya dari berbagai disiplin ilmu-ilmu terkait bidang kerja sehingga diharapkan memiliki kemampuan profesional dalam menunjang tugas yang diembannya serta mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan personil yang ada saat ini berjumlah 84 Orang dengan jumlah ASN 45 orang dan tenaga honorer 39 Orang.

Tabel 2.1

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Asmat Berdasarkan Jenis Kelamin

Status Kepegawaian	Laki-Laki	Perempuan
Aparatur Sipil Negara (ASN)	33	10
Tenaga Honorer	32	7

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat (data tahun 2023)

Dari tabel 2.1 diatas dapat dilihat jumlah ASN dan tenaga honorer berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 65 dan perempuan berjumlah 17 orang, sementara itu penyajian data ASN menurut jabatan dan golongan/ ruang dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat Berdasarkan Pangkat

No	JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	Pembina / IV.b	1
2	Sekretaris	Pembina / IV.b	1
3	Kepala Bidang	Pembina/ IV.a	4
		Penata TK. I/ III.d	-
		Penata/ III.c	-
4	Kepala Seksi	Penata TK. I/ III.d	3
		Penata/ III.c	1
		Penata Muda TK.I/ III.b	3
		Penata Muda / III.a	-
		Pengatur Tk. I/ II.d	-
5	Pelaksana	Penata TK. I/ III.d	-
		Penata/ III.c	3
		Penata Muda Tk.I/ III.b	6
		Penata Muda/ III.a	6
		Pengatur Tk. I/ II.d	5
		Pengatur/ II.c	4
		Pengatur Muda TK. I/ II.b	4
		Pengatur Muda / II.a	1
		Juru / I.c	
		Juru Muda/ I.b	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Asmat

Dari table 2.2 diatas dapat dilihat pembagian pegawai menurut jabatan dan golongan/ruang kepangkatan dimana jumlah ASN dengan pangkat Penata muda/III.b berjumlah paling banyak yaitu 9 orang, sementara penyebaran pegawai yang menduduki jabatan sudah memenuhi syarat kepangkatan minimal.

2.1.2.2 Inventarisasi Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja sangat diperlukan dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sejauh ini ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dikatakan belum memadai dan masih jauh dari cukup.

Gambaran sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat selanjutnya diuraikan dalam tabel berikut;

Tabel 2.3

Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat

<i>Jenis Aset</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Kondisi</i>			<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
		RB	RR	B			
1. TANAH	58637 M2				2017	Rp. 293,185,000,00	Tanah bangunan jalan dan jalan jembatan
2. ALAT – ALAT BESAR	1 UNIT			B	2015	Rp. 25,800,000,-	Genset 5KVA
	1 UNIT			B	2016	Rp. 383,500,000,-	Generator Listrik
3. ALAT – ALAT ANGKUTAN	1 BUAH			B	2011	Rp. 239,500,000,-	Speedboat 85 PK
	1 UNIT			B	2015	Rp. 406,500,000,-	Speedboat 115 PK

<i>Jenis Aset</i>		<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
4. ALAT – ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1 UNIT	B	2009	2,100,000.00	Aluminium (Bak ukur)
	1 UNIT	B	2009	2,100,000.00	Aluminium (Bak ukur)
	1 UNIT	B	2009	74,700,000.00	Alat sondir lapangan
	1 UNIT	B	2009	2,100,000.00	Aluminium (Bak ukur)
	1 UNIT	B	2009	2,100,000.00	Aluminium (Bak ukur)
	1 UNIT	B	2010	15,812,500.00	GPS
	1 UNIT	B	2011	119,900,000.00	Alat Ukur
	1 UNIT	B	2012	5,000,000.00	Kompresor
	1 UNIT	B	2012	15,000,000.00	GPS
	1 UNIT	B	2012	15,000,000.00	GPS
	1 UNIT	B	2013	101,850,000.00	Alat Ukur
	1 UNIT	B	2013	4,545,000.00	Tangga Lipat
	1 UNIT	B	2013	1,855,000.00	Tangga Lipat
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
	1 UNIT	B	2014	44,999,900.00	Timbangan OHAUS
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
	1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2014	3,499,100.00	Mold (5 kg cap)
1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
1 UNIT	B	2014	149,999,300.00	Compressor Machine
1 UNIT	B	2014	91,999,620.00	Los Angeles Abration Machine
1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
1 UNIT	B	2014	17,999,300.00	Timbangan Digital
1 UNIT	B	2014	2,271,500.00	Concrete Cub Maut
1 UNIT	B	2017	15,000,000.00	GPS
5. ALAT- ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA				
1 UNIT	B	2007	4,569,600.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,550,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,264,120.00	Kursi Putar
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,365,000.00	Meja Rapat
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	3,750,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2008	2,586,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,550,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,264,120.00	Kursi Putar
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	3,750,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2008	1,365,000.00	Meja Rapat
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,822,110.00	Kursi Putar
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,550,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,500,000.00	Lemari buku
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,365,000.00	Meja Rapat
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	3,750,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,822,110.00	Kursi Putar
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,550,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,264,120.00	Kursi Putar
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,365,000.00	Meja Rapat
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	3,750,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	2,586,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	6,000,000.00	Kursi Sofa
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,264,120.00	Kursi Putar
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,365,000.00	Meja Rapat
1 UNIT	B	2008	3,750,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2008	341,250.00	Kursi Lipat
1 UNIT	B	2008	1,822,110.00	Kursi Putar
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	9,500,000.00	Pompa Air/ Alkon
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2009	9,500,000.00	Pompa Air/ Alkon
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2009	4,475,000.00	tabung pemadam
1 UNIT	B	2010	6,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2010	2,714,285.28	Meja kerja
1 UNIT	B	2010	2,714,285.71	Meja kerja
1 UNIT	B	2010	2,714,285.72	Meja kerja
1 UNIT	B	2010	6,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2010	2,714,285.71	Meja kerja
1 UNIT	B	2010	6,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2010	2,714,285.72	Meja kerja
1 UNIT	B	2010	2,714,285.71	Meja kerja
1 UNIT	B	2010	2,714,285.72	Meja kerja
1 UNIT	B	2011	3,750,000.00	Kipas Angin
1 UNIT	B	2011	3,500,000.00	Vacum Cleaner
1 UNIT	B	2011	75,000,000.00	Tabung Pemadam / Portable
1 UNIT	B	2011	6,000,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2011	6,000,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	2,631,140.00	Filling Kabinet Kayu
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	3,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	2,631,140.00	Filling Kabinet Kayu
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	2,631,140.00	Filling Kabinet Kayu
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	2,800,000.00	lemari es
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	3,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	2,631,140.00	Filling Kabinet Kayu
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	3,289,000.00	Printer
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	2,631,140.00	Filling Kabinet Kayu
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	2,299,930.00	Dispenser
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2012	7,811,250.00	Sofa
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	2,631,140.00	Filling Kabinet Kayu
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2012	3,289,000.00	Printer
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2012	411,125.00	Kursi Rapat
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	4,000,000.00	Sofa
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	3,000,000.00	Printer
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	3,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	5,000,000.00	Parabola dan Reciver
1 UNIT	B	2013	3,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	4,000,000.00	Sofa
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	9,078,500.00	AC
1 UNIT	B	2013	3,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	590,479.00	Kipas Angin

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	3,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	1,750,000.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2013	3,000,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	705,250.00	Kipas Angin
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	6,500,000.00	Parabola dan Reciver
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	15,000,000.00	Komputer P.C
1 UNIT	B	2014	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	4,208,750.00	Printer
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	705,250.00	Kipas Angin
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	8,660,925.00	Famximile
1 UNIT	B	2014	3,000,000.00	LEMARI KAYU

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	15,000,000.00	Komputer P.C
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	4,208,750.00	Printer
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	705,250.00	Kipas Angin
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	15,000,000.00	Komputer P.C
1 UNIT	B	2014	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	4,208,750.00	Printer
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	705,250.00	Kipas Angin
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	13,650,000.00	Televisi
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	15,000,000.00	Komputer P.C
1 UNIT	B	2014	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	4,208,750.00	Printer
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2014	705,250.00	Kipas Angin
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	1,750,000.00	Meja 1/2 Biro
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2014	750,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2015	15,000,000.00	Komputer P.C
1 UNIT	B	2015	11,625,000.00	AC
1 UNIT	B	2015	15,000,000.00	Komputer P.C
1 UNIT	B	2015	11,625,000.00	AC
1 UNIT	B	2015	11,625,000.00	AC
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	10,255,700.00	Televisi
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	80,000,000.00	Papan Nama Instansi
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	49,600,000.00	Penampung Air Hujan
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	169,700,000.00	Mesin Laminating
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	37,500,000.00	Filling Kabinet Kayu
1 UNIT	B	2016	26,000,000.00	Kamera
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	101,100,000.00	Pompa Air/ Alkon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2016	2,998,600.00	Profil Tank/Tandon
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	19,800,000.00	Papan Nama Instansi
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	4,070,000.00	Papan Data

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,070,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	15,400,000.00	Papan Nama Instansi
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	33,825,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	4,070,000.00	Papan Data

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	49,900,000.00	Papan Nama Instansi
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	4,070,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	14,795,000.00	Papan Nama Instansi
1 UNIT	B	2017	33,825,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	4,070,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,486,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	49,900,000.00	Papan Nama Instansi
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	4,070,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	3,960,000.00	Papan Data
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	845,000.00	Pelampung air
1 UNIT	B	2017	2,597,100.00	Gorden
1 UNIT	B	2017	4,041,400.00	Meja kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	15,178,833.33	Komputer P.C
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Cetak Es Batu
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Cetak Es Batu
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Cetak Es Batu
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	15,178,833.33	Komputer P.C
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Cetak Es Batu
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Cetak Es Batu
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Pencetak Label
1 UNIT	B	2018	15,178,833.33	Komputer P.C
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	15,178,833.35	Komputer P.C
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Cetak Es Batu
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	15,178,833.33	Komputer P.C
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Cetak Es Batu
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Cetak Es Batu
1 UNIT	B	2018	2,100,000.00	Alat Pencetak Label
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	15,178,833.33	Komputer P.C
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2018	2,150,000.00	Alat Cetak Es Batu
1 UNIT	B	2018	555,500.00	Kursi Kerja
1 UNIT	B	2019	9,790,000.00	Proyektor / Infokus
1 UNIT	B	2019	10,560,000.00	Kain Gorden
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	45,870,000.00	Brankas
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
1 UNIT	B	2020	4,488,000.00	Lemari Arsip
5 UNIT	B	2023	7.780.000.00	Printer Epson
6 UNIT	B	2023	18.216.667.00	Komputer All in One Lenovo
2 UNIT	B	2023	7.100.000.00	AC SHARP
6. Alat Studio Komunikasi				
1 UNIT	B	2018	12,925,000.00	Sound System
1 UNIT	B	2018	35,000,000.00	Sound System
1 UNIT	B	2021	6,300,000.00	GPS
1 UNIT	B	2021	44,850,000.00	Drone Dji Phantom
1 UNIT	B	2021	6,300,000.00	GPS
7. Alat Laboratorium				
1 UNIT	B	2022	5.924.775,96	Digital Balance GE 163 (Capacity, 10 Kg, 20 Kg, 50 Kg)
1 UNIT	B	2022	208.781,01	Thermometer GE - 601, range 0 - 150 c
1 UNIT	B	2022	869.028,99	Stainless Steel Round Sieve (AG-318 A)
1 UNIT	B	2022	15.136.364,04	Kompresor Shark
1 UNIT	B	2022	1.013.935,05	Graduated Cylinder Glass made (GE-404), 500 MI
1 UNIT	B	2022	434.212,02	Mixing Bowl (GE - 360), 20 cm
1 UNIT	B	2022	402.022,02	Breaker Glass GE- 424, 1000 MI

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 UNIT	B	2022	450.356,97	Square Pan GE-302, 50 X 50 X 7, 5 cm
1 UNIT	B	2022	869.028,99	Stainless Steel Round Sieve (AG-318 A)
1 UNIT	B	2022	917.264,04	Volumetric Flask GE - 412, 500 MI
1 UNIT	B	2022	724.023,03	Graduated Cylinder Glass made (GE-403), 250 MI
1 UNIT	B	2022	2.060.463,03	Mantel Cone SO - 206 A
1 UNIT	B	2022	157.398.000,00	Baby Roller
1 UNIT	B	2022	257.115,96	Round Pan (GE-350), Alumunium Sheet
1 UNIT	B	2022	17.649.000,00	Breaker Glass GE- 424, 1000 MI
1 UNIT	B	2022	192.735,96	Thermometer GE - 601, range 0 - 100 c
1 UNIT	B	2022	869.028,99	Stainless Steel Round Sieve (AG-318 A)
1 UNIT	B	2022	1.738.462,02	Keran Sondir
1 UNIT	B	2022	369.832,02	Mixing Bowl (GE - 360), 14 cm
1 UNIT	B	2022	369.832,02	Breaker Glass GE- 422, 600 MI
1 UNIT	B	2022	369.832,02	Square Pan GE-303, 65 X 65 X 7, 5 cm
1 UNIT	B	2022	869.028,99	Stainless Steel Round Sieve (AG-318 A)
1 UNIT	B	2022	384.866,97	Thin Box (GE - 390),

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
				60 gram
1 UNIT	B	2022	2.060.463,03	Friction So-207 A
1 UNIT	B	2022	10.289.194,95	Laboratory Concrete Mixer (CO-610)
1 UNIT	B	2022	2.865.514,95	Absorption Of Fine Anggregate Test Set (AG-810)
1 UNIT	B	2022	482.546,97	Mixing Bowl (GE - 360), 20 cm
1 UNIT	B	2022	450.356,97	Breaker Glass GE-424, 1000 MI
1 UNIT	B	2022	611.407,98	Conduktivty Meter
1 UNIT	B	2022	869.028,99	Stainless Steel Round Sieve (AG-318 A)
1 UNIT	B	2022	1.722.315,96	Graduated Cylinder made (GE - 405), 1000 MI
1 UNIT	B	2022	305.452,02	Mixing Bowl (GE - 360), 10 cm
1 UNIT	B	2022	273.262,02	Breaker Glass GE-421, 250 MI
1 UNIT	B	2022	16.729.717,98	Specipic Gravity & A.CA Digital Balance Test set (AG - 830)
1 UNIT	B	2023	18.870.000,00	Concrete Culter Stihl ST 420
2 UNIT	B	2023	9.546.000,00	Hand Blower Sthil BG 50
1 UNIT	B	2023	26.495.700,00	Mesin Bord Beton Makita
1 UNIT	B	2023	11.499.600,00	Jack Hammer Mail

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>	
				Tank Makita	
8. BANGUNAN GEDUNG	27 M2	B	2020	493,342,000.00	Rumah Genset
	0,00	B	2022	294,000,000.00	Bangunan Rumah Jaga
	0,00	B	2022	29,650,000.00	Rumah Mesin
	0,00	B	2022	221,750,000.00	Pembangunan Pagar Sumur Bor
	36 M2	B	2023	353.379.000,00	Rumah Jaga Tipe 36 M2 di Intake Kampung Yepem Distrik Agats
	36 M2	B	2023	320.773.000,00	Rumah Jaga Sumur Bor Konstruksi Kayu tipe 36 Distrik Siret
	1 UNIT	B	2023	113.750.000,00	Dudukan mesin pompa intake Yepem di Distrik Agats
	42 M2	B	2023	216.850.000,00	Rumah Jaga Sumur Bor Konstruksi Kayu Tipe 42 M2 Distrik Agats
	1 UNIT	B	2023	184.300.000,00	Pintu Gerbang Akses Intake
9. BANGUNAN MONUMEN	36 M2	B	2016	Rp. 50.000.000,-	Pemeliharaan dan Pemasangan Lampu Tugu
10. JALAN DAN JEMBATAN		B	2015	Rp. 840,156,173,732. 37	Jalan jembatan , Beton dan Komposit

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
	B	2023	Rp. 125.985.777.259, 29	Jalan jembatan , Beton
11. BANGUNAN AIR/TRIGASI	B	2009 s/d 2020	Rp. 154, 166,607,017.39	Irigasi dan jaringan
	B	2023	7.188.169.000	Irigasi dan jaringan
12. INSTALASI	B	9/23/2 013	38,900,000.00	Instalasi Listrik
1 Unit	B	4/16/2 014	50,000,000.00	Instalasi Listrik Kantor
1 Unit	B	7/4/20 20	493,118,000.00	INSTALASI AIR
1 Unit	B	8/30/2 021	495,000,000.00	Sistem Pengolahan Air Sederhana (Sipas)
1 Unit	B	12/30/ 2022	60,800,000.00	Pekerjaan Penyediaan Instalasi pengolahan Air sumur Bor
1 Unit	B	12/30/ 2022	82,000,000.00	Pekerjaan Penyediaan Instalasi Pengelolaan Air Sumur Bor Di PLN Distrik Agats
1 Unit	B	12/30/ 2022	497,500,000.00	Pekerjaan Penyediaan Instalasi Pengelolaan Air Sumur Bor Di PLN Distrik Agats

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
	1 UNIT	B 2023	39.627.000	Pekerjaan : Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Sumur Bor Dolok Agats
	1 UNIT	B 2023	563.850.000,00	Penyediaan Instalasi Pengolahan Air Sumur Bor Distrik Siret
12. JARINGAN		B 12/31/ 2019	85,000,000.00	Jaringan Air Bersih
		B 6/10/2 022	4,182,706,640.00	Pekerjaan Pengembangan Jaringan Distribusi dan (Sambungan Rumah Kampung Agats, Distrik Agats)1022 SR
		B 2023	24.820.000	Pekerjaan Pengadaan Jaringan LAN Tenaga Teknis SIMBG
13.BUKU PERPUSTAK AAN	1 Buku	B 2017	21.780.000,00	Master Plan Kawasan
	1 Buku	B 2017	22.880.000,00	Master Plan Kawasan Perkantoran
	1 Buku	B 2017	9.020.000,00	Penyusunan RPI2JM
	1 Buku	B 2017	8.800.000,00	DED Air Bersih
	1 Buku	B 2019	15.000.000,00	DED

<i>Jenis Aset</i>	<i>Kondisi</i>	<i>Tahun</i>	<i>Nilai Perolehan</i>	<i>Ket</i>
1 Buku	B	2019	86.318.182,01	Perencanaan Tata ruang Perencanaan DED master Plan
1 Buku	B		19.800.000,00	Survai Investigasi Kondisi Jalan dan Jembata Kab. Asmat
1 Buku	B	2021	19.800.000,00	Perencanaan DED Jalan Beton Distrik Koroway Buluanop
1 Buku	B	2021	16.800.000,00	Perencanaan DED Jalan Jembatan Konstruksi Beton Distrik Pantai Kasuari
1 Buku	B	2021	9.000.000,00	Perencanaan DED Jalan Jembatan Konstruksi Beton Distrik Siret
1 Buku	B	2021	19.800.000,00	Perencanaan DED Jalan Jembatan Konstruksi Beton Distrik Suator
1 Buku	B	2021	10.000.000,00	Survey data Awal Pembangunan Jalan Jembatan
	B	2023	100.516.605,00	Buku Perpustakaan

2.1.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pada Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dapat disajikan hasil-hasil capaian indikator atas setiap program dan kegiatan menurut tugas dan fungsi Dinas

PUPRKP kabupaten Asmat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah kabupaten Asmat tahun 2025-2029 pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat
Tahun 2021-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Rasio bangunan ber IMB Per tahun bangunan	49,10	52,77	56,27	76,00	52,41	61,38	70,90	78,07	106,7 4%	116,3 2%	3,50 %	102,7 2%
2	Ruang Publik yang berubah peruntukannya				30,00				18,05				60,17 %
3	Persentase penduduk berakses air minum	74,50	9,12	11,25	13,5	4,56	10,4	7,53	14,68	6,12 %	114,0 4%	13,38 %	108,7 4%
4	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air bersih, perkotaan dan pedesaan	10,52	10,96	11,43	15,00	8,51	13,2	12,93	14,10	80,89 %	120,4 4%	113,1 2%	94,00 %
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	18,90	24,57	31,94	35,00	15,27	18,6	19,98	21,17	80,79 %	75,70 %	177,6 0%	60,49 %
6	Persentase peningkatan panjang jalan per tahun	30,31	33,05	36,56	65,00	28,04	40,33	64,15	92,33	92,51 %	122,0 3%	561,2 4%	142,0 5%
7	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	35,10	40,10	45,08	50,52	31,36	31,55	32,6	27,87	89,34 %	78,68 %	102,0 7%	55,17 %

Sumber : Dinas PUPR Kab. Asmat tahun 2025

Dari table 2.4 diatas dapat dilihat bahwa dari jenis uraian indikator kinerja pada penyusunan dan penetapan Renstra Dinas PUPR Kabupaten Asmat tahun 2025-2029 terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian :

1. Beberapa indikator perlu disesuaikan kembali dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kabupaten Asmat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Asmat dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
2. Penetapan target-target capaian kinerja berpedoman pada Indikator kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah daerah Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dari RPJMD tahun 2025-2029;

Sementara itu penjelasan tentang capaian-capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap tahun direncanakan adanya kenaikan kemantapan jalan di Kabupaten Asmat, dengan upaya untuk mengubah konstruksi kayu menjadi konstruksi beton. Pemerintah Daerah senantiasa berupaya untuk mendorong perubahan konstruksi dimaksud sehingga terwujudnya konektivitas wilayah yang berkualitas dan bertahan lama. Fokus pelayanan dan pendanaan 2022-2023 pada perbaikan jalan, hal ini menjadi perhatian karena pentingnya pemeliharaan aset jalan yang menjadi penghubung wilayah pada Kabupaten Asmat masih 67,40% dalam kondisi tidak mantap dan membutuhkan pemeliharaan dengan biaya yang cukup tinggi.
2. Dalam 2 tahun pelaksanaan Renstra pencapaian kinerja masih belum maksimal dicapai karena keterbatasan pendanaan. Yang menjadi kendala terkait

pendanaan adalah dihapuskannya alokasi Dana Alokasi Khusus bidang air minum dan sanitasi pada tahun 2022-2023 sehingga tingkat pencapaian realisasi kinerja masih sangat rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, hal ini menjadi perhatian penting karena air minum, air bersih dan sanitasi merupakan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Beberapa bangunan air andalan yang sudah ada adalah terdapat 3 unit sumur Bor yaitu sumur bor Dolog, Museum, Pelabuhan dan 1 unit sumur bor di Distrik Siret, 6 Unit sumur Air tanah, 11 Unit Reservoir, 1 Unit SPAM Distrik Agats, 1 Unit SPAM Omor dan 1 Unit SPAM Distrik Atsj. Dari perkembangan pembangunan fasilitas air sangat dibutuhkan alokasi dana yang lebih untuk ketersediaan air baku bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat didukung dengan dana untuk operasionalisasi pemanfaatan bangunan air dimaksud.
4. Terkait dengan baru ditetapkannya RDTR kawasan perkotaan Agats melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Agats, maka ada penyesuaian terhadap pemanfaatan ruang dan bangunan di kota Agats. Upaya Dinas PUPR untuk menertibkan bangunan melalui Izin Mendirikan Bangunan terus dilakukan sehingga wajah kota Agats menjadi lebih tertib dari segi penataan bangunan dan fungsinya.
5. Penyelenggaraan tugas dan fungsi penataan ruang tidak maksimal, dapat dilihat dari beberapa program dan kegiatan yang belum menyentuh fungsi-fungsi penataan ruang yang ideal, hal ini dikarenakan perubahan nomenklatur bidang dan ada uraian tugas yang tidak dijabarkan dengan baik.

Setelah diuraikan beberapa hal tentang capaian kinerja atas indikator-indikator tersebut, hasil evaluasi terhadap kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat

URAIAN	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.007.953.226	7.976.681.511	54.748.047.399	83.248.222.998	7.038.369.979	6.840.446.609	42.528.967.284	84.297.847.850
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.000.000	23.000.000	23.000.250	23.000.250	23.000.000	23.000.000	22.856.475	22.890.149
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.000.000	23.000.000	23.000.250	23.000.250	23.000.000	23.000.000	22.856.475	22.890.149
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.584.949.350	5.584.949.350	5.927.739.345	5.791.630.158	5.596.842.903	4.853.715.773	5.110.405.845	5.331.870.917
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.561.949.350	5.561.949.350	5.904.739.095	5.768.629.908	5.596.842.903	4.830.715.773	5.087.549.370	5.308.980.768
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SKPD	23.000.000	23.000.000	23.000.250	23.000.250		23.000.000	22.856.475	22.890.149

URAIAN	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Administrasi Umum Perangkat Daerah	596.518.876	899.786.525	762.459.525	779.399.275	555.899.076	704.501.808	931.599.937	880.630.306
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.978.876	144.285.525	196.354.525	311.431.275	85.649.876	141.725.800	198.307.077	359.064.975
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.220.000	58.637.000	58.637.000		32.641.500	58.626.055	58.564.860	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	466.320.000	696.864.000	507.468.000	467.968.000	437.607.700	504.149.953	674.728.000	521.565.331
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	272.035.000	752.097.760	47.438.056.479	75.991.778.315	-	662.080.528	35.939.532.553	77.523.022.264
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000	272.582.250	231.484.800	12.846.000		246.137.252	228.811.300	12.765.000
Pengadaan Aset Tetap Lainnya			40.000.000					
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.035.000	479.515.510	47.166.571.679	75.978.932.315		415.943.276	35.710.721.253	77.510.257.264
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.450.000	519.924.140	596.791.800	662.415.000	601.784.000	459.648.500	524.572.474	539.434.214

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
ASMAT TAHUN 2025 - 2029

URAIAN	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penyediaan jasa surat menyurat	11.000.000							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.550.000	82.215.000	97.215.000	97.215.000	61.812.000	53.040.000	44.225.974	49.120.714
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.900.000	437.709.140	499.576.800	565.200.000	539.972.000	406.608.500	480.346.500	490.313.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	196.923.736	-	-	260.844.000	137.500.000	-	-
Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya		32.250.000			3.400.000	29.700.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		56.000.000						
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		108.673.736			257.444.000	107.800.000		
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	2.213.614.455	4.053.193.476	4.182.789.123	4.769.020.472	1.681.180.500	4.020.136.275	4.157.507.604	4.980.160.871

URAIAN	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.213.614.455	4.053.193.476	4.182.789.123	4.769.020.472	1.681.180.500	4.020.136.275	4.157.507.604	4.980.160.871
Pembangunan Unit Air Baku	2.213.614.455	4.053.193.476	4.182.789.123	4.769.020.472	1.681.180.500	4.020.136.275	4.157.507.604	4.980.160.871
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya								
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.906.448.066	10.930.542.400	6.504.655.012	3.638.030.995	146.000.000	6.375.725.949	9.471.930.026	3.580.531.378
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.906.448.066	10.930.542.400	6.504.655.012	3.638.030.995	146.000.000	6.375.725.949	9.471.930.026	3.580.531.378
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM		803.130.000	1.430.000.000	1.675.116.000,00		802.146.000	1.422.978.290	1.665.282.786

URAIAN	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	980.624.000	5.199.172.000				4.227.106.640		
Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	359.472.000	1.005.200.400	1.787.904.276	1.962.914.995,00	146.000.000	970.677.709	1.796.746.628	1.915.248.592
Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	3.566.352.066	3.923.040.000	1.796.814.586			375.795.600	4.913.841.251	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			1.489.936.150				1.338.363.857	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.710.320.333	5.480.253.400	1.858.890.000	1.725.678.125	-	5.439.070.811	1.848.795.745	1.696.246.091
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.710.320.333	5.480.253.400	1.858.890.000	1.725.678.125	-	5.439.070.811	1.848.795.745	1.696.246.091
Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	2.710.320.333	5.480.253.400				5.439.070.811		

URAIAN	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT			1.858.890.000				1.848.795.745	
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				1.725.678.125,00				1.696.246.091
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	479.966.000	430.226.000	706.215.575	631.683.918	464.048.000	527.879.600	696.455.794	266.686.479
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	479.966.000	430.226.000	706.215.575	631.683.918	464.048.000	527.879.600	696.455.794	266.686.479
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung								

URAIAN	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	236.102.000	192.302.000	240.440.750	631.683.918,0 0	221.546.000	192.302.000	234.216.571	266.686.479
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	243.864.000	237.924.000	314.281.250		242.502.000	335.577.600	282.347.800	
Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota			151.493.575				179.891.423	
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-	1.274.334.750	1.967.420.917	-	-	574.828.942	1.339.916.786
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	1.274.334.750	1.967.420.917	-	-	574.828.942	1.339.916.786

URAIAN	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				549.994.842				
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			1.274.334.750	1.417.426.075			574.828.942	1.339.916.786
Penataan Bangunan dan Lingkungan								
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	84.870.560.993	115.519.629.630	125.477.505.414	136.121.908.354	69.444.806.423	125.505.967.939	120.222.723.478	131.545.299.378
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	84.870.560.993	115.519.629.630	125.477.505.414	136.121.908.354	69.444.806.423	125.505.967.939	120.222.723.478	131.545.299.378
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	2.078.428.910	1.794.142.000	2.763.208.000	2.551.540.000,00	2.110.157.760	1.785.316.357	1.664.114.000	2.512.874.000
Pembangunan Jalan	40.083.775.406	58.930.035.841	89.535.843.490	41.505.204.518,00	31.030.381.845	65.393.402.044	86.587.615.519	39.280.967.316
Rekonstruksi Jalan	39.705.817.718	51.052.472.004	25.218.453.397	90.103.527.319,00	32.079.030.666	54.423.510.748	25.771.610.183	87.260.173.888

URAIAN	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pemeliharaan Rutin Jalan	3.002.538.959	3.742.979.785	7.960.000.527	1.961.636.517,00	4.225.236.152	3.903.738.790	6.199.383.776	2.491.284.174

2.1.3.1. Analisis Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Asmat

Dari hasil dari gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat menurut Renstra 2021-2025 yang telah berjalan 4 (empat) tahun maka diperoleh permasalahan meliputi :

1. Kondisi Jalan dalam wilayah kabupaten Asmat masih belum memadai dan tingginya persentase jalan dengan kondisi rusak;
2. Rendahnya akses masyarakat akan ketersediaan air bersih dan ketersediaan sanitasi;
3. Pemanfaatan dan penataan ruang yang belum sesuai dengan peruntukannya;
4. Dokumen-dokumen penataan ruang yang belum lengkap;
5. Abrasi pantai yang meningkat;
6. Belum terlaksananya program irigasi dan kurangnya koordinasi mengenai pembukaan lahan pertanian dengan Perangkat daerah terkait;
7. Penyerapan anggaran yang rendah;
8. Kondisi sarana dan prasarana yang belum mencukupi kebutuhan operasional dinas dan beberapa yang rusak;

2.1.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ASMAT

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat sebagai pusat koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar infrastruktur di Kabupaten Asmat dihadapkan pada tantangan dan peluang untuk mengkonsolidasikan potensi dan permasalahan yang melingkupi tugas dan

fungsinya dalam kerangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

a. Tantangan :

- 1) Kondisi Geografis yang sulit
- 2) Minimnya Aksesibilitas
- 3) Kualitas Material

b. Peluang :

- 1) Pembangunan infrastruktur berkelanjutan
- 2) Peningkatan Aksesibilitas
- 3) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

2.1.5 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat mencakup seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Asmat, dengan fokus pada pelayanan infrastruktur dan tataruang yang memadai untuk mendukung pembangunan daerah.

Berikut ini beberapa kelompok sasaran dalam ruang lingkup bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat:

a. Masyarakat Umum

Dinas PUPRKP bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur publik seperti: Jalan, jembatan, air bersih dan fasilitas umum lainnya yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

b. Pemangku kepentingan

Dinas PUPRKP juga berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, dan pengembang untuk memastikan perencanaan

dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan.

c. Pengguna Ruang

Dinas PUPRKP bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi tataruang yang bertujuan untuk mengatur penggunaan ruang secara optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.

d. Pemilik Properti

Dinas PUPRKP juga terlibat dalam penyediaan layanan dan pengawasan terkait perumahan dan kawasan permukiman, termasuk memastikan kualitas dan keamanan bangunan serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memberikan pelayanan, senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal maupun eksternal, dan aspiratif bagi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungannya merupakan bagian dari perencanaan yang tidak boleh diabaikan.

Beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , antara lain;

- Masih belum memadainya sarana dan prasarana kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- Masih lemahnya kapasitas sumber daya manusia dalam melaksanakan berbagai bidang tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
- Belum lengkapnya database dan petunjuk teknis dari masing-masing bidang tugas;
- Belum memadainya jalinan koordinasi antar lini pemerintahan sehingga terjadi tumpang tindih program dan kegiatan;

Dalam perspektif tersebut diperlukan proses internal untuk membenahi keberadaan faktor internal tersebut, disamping harus tetap fokus dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang telah diuraikan pada bab 2, yaitu;

- Pembangunan Kebinamargaan
- Penataan Ruang
- Pembangunan keciptakarya
- Pembangunan sumber daya air
- Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

a. Pembangunan Kebinamargaan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Asmat, adalah;

- Kondisi tanah yang tidak stabil menyebabkan jalan dan jembatan yang dibangun cepat rusak;
- Belum memadainya kondisi peralatan dan teknologi kerja pembangunan jalan dan jembatan;
- Sebagian besar ruas jalan yang ada dalam keadaan rusak berat dan sedang;
- Pembangunan jalan dan jembatan dengan konstruksi kayu hanya bertahan selama 3 tahun sebelum masa pemeliharannya.

b. Penataan Ruang Daerah

Tujuan Penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan rencana pemanfaatan ruang wilayah yang serasi, optimal serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan daerah yang akan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam melakukan pembangunan keruangan. Disamping itu tujuan lain yang diharapkan adalah mewujudkan keteraturan antara kegiatan yang memanfaatkan ruang dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pendukungnya, seperti kebijaksanaan mengenai kawasan yang harus dilindungi, kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, jaringan prasarana utama serta kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Asmat telah melaksanakan berbagai terobosan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang dan permukiman wilayah, namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan, diantaranya;

- Belum tertatanya permukiman penduduk di wilayah perkotaan dan ibukota distrik lainnya ;

- Masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pengawasan pemanfaatan ruang daerah;

c. Sumber Daya Air

Beberapa masalah dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya air di Kabupaten Asmat adalah;

- Belum memadainya pembangunan Talud dengan pertimbangan sebagian besar wilayah Kabupaten Asmat berada dipinggir pantai dan kali yang sering terkena bencana abrasi.
- Belum didapatnya sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Asmat untuk menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat;
- Rendahnya jumlah masyarakat yang telah terakses dengan air bersih;
- Belum berkembangnya sistem pertanian yang membutuhkan irigasi teknis di Kabupaten Asmat.

d. Bidang Keciaptakaryaan

Beberapa masalah terkait dengan bidang cipta karya di Kabupaten Asmat adalah;

- Rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan air limbah;
- Rendahnya Kesadaran masyarakat khususnya di kampung-kampung atas sanitasi;
- Belum memadainya keberadaan sanitasi di wilayah perkotaan dan wilayah pemukiman lainnya;
- Rendahnya SDM terkait dengan teknik konstruksi baik dari penyedia jasa maupun dari lingkup organisasi pemerintah daerah sendiri;

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pemeliharaan fasilitas air bersih
- e. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Beberapa faktor internal yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan , antara lain;
 - Sarana dan prasarana kerja di lingkungan Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang belum memadai ;
 - Kapasitas sumber daya manusia belum maksimal dalam melaksanakan berbagai bidang tugas Bidang Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
 - Belum lengkapnya database dan petunjuk teknis dari masing-masing bidang tugas;
 - Koordinasi antar lini pemerintahan yang belum memadai sehingga kualitas perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan kurang maksimal.

2.2.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

2.2.2.1 Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Asmat. Pernyataan Visi Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Asmat sampai dengan tahun 2029

difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, adalah:

“Terwujudnya Asmat yang sehat, Cerdas dan Sejahtera”

Pernyataan Visi Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 memiliki makna sebagai berikut:

Asmat Sehat: mencerminkan masyarakat yang memiliki kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal, memungkinkan seseorang untuk hidup produktif dan berkualitas sehingga mampu mewujudkan kehidupan maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatannya sendiri, sesuai karakteristik masyarakat asmat.

Asmat Cerdas: dicerminkan dari kondisi masyarakat Asmat Papua yang memiliki kemampuan dalam rangka mendapatkan serta menerapkan, pengetahuan, informasi, serta keterampilan, melalui 3 unsur yaitu akal, berpikir dan intuisi yang tidak terlepas dari unsur alam dan buatan manusia dengan memanfaatkan sumber-sumber potensi daerah.

Asmat Sejahtera: mencerminkan Asmat yang mempunyai taraf kehidupan dan penghidupan yang baik, dalam bidang pelayanan sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang inovatif dan produktif.

2.2.2.2 Misi

Memperhatikan visi dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, dilakukan dengan upaya melalui 6 Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan standard dan kualitas pelayanan kesehatan;
2. Memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan;
3. Mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur;
5. Membangun birokrasi yang bersih, responsif, transparan dan akuntabel;
6. Mendorong pertumbuhan investasi dalam memperluas lapangan kerja.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Dalam Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2025-2029 tujuan secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang produktif, cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar serta berkelanjutan, yang berazaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera dengan penjabaran tujuan tersebut terdiri dari :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan resiko/kerentanan bencana alam;

2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan system logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM vokasional bidang konstruksional yang kompeten dan professional;
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sementara itu tema pembangunan atau pemetaan potensi per pulau dalam rangka pengembangan wilayah khususnya wilayah papua adalah : Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, Kehutanan; Percepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritiman; Percepatan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Migas & Tembaga; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam; Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Kampung Masyarakat Adat

Dari tujuan dan pemetaan potensi per pulau diatas maka terdapat strategi yang mendukung urusan pemerintahan pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu:

- a. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan

kawasan perdesaan;

- b. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
- c. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritime.

Dengan memperhatikan kebijakan pembangunan dan isu-isu strategis internasional, nasional serta regional dan aspek lainnya maka isu strategis pembangunan Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut:

Infrastruktur dasar daerah merupakan unsur penting yang menunjang aktivitas perekonomian, sosial dan budaya masyarakat. Oleh karena itu identifikasi permasalahan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah identifikasi permasalahan pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Asmat.

Tabel 2.6

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya konektivitas antar wilayah	Masih adanya kampung yang belum terhubung jalur darat	Rendahnya ketersediaan jalan
		Rendahnya ketersediaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		jembatan
	Rendahnya kualitas infrastruktur jalur darat yang terbangun	Masih rendahnya kualitas jalan dan jembatan
Belum optimalnya akses air bersih	Belum optimalnya pemanfaatan air baku	Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air baku
		Kurangnya pemeliharaan infrastruktur air baku
Belum optimalnya kualitas tata ruang dan bangunan	Belum optimalnya kualitas bangunan	Belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan
	Belum optimalnya kualitas penataan tata ruang	Masih adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang
		Belum optimalnya perencanaan tata ruang

2.2.3.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Asmat

Berdasarkan permasalahan daerah serta isu strategis dikaitkan dengan target-target pembangunan yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagai cara atau upaya yang ditempuh dalam kurun waktu 2025-2029. Sedangkan Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah

kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih operasional dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Adapun Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Asmat melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama empat tahun ke depan.

Strategi dan arah kebijakan disusun dari serangkaian proses perencanaan strategis yang dirumuskan dengan pertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus dihadapi selama empat tahun ke depan. Rumusan strategi disusun dengan memperhatikan faktor internal maupun eksternal, menggambarkan hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan kelemahan, peluang, dan ancaman.

2.2.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

Penelaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menjadi bagian penting dalam konteks perencanaan dan pengembangan wilayah sebab, RTRW merupakan dokumen perencanaan yang mengatur tata ruang suatu wilayah dalam skala kabupaten/kota atau bahkan provinsi yang mencakup aspek-aspek seperti penggunaan lahan, zona-zona khusus, transportasi, pemukiman, dan lain-lain. Penelaahan dokumen ini memastikan bahwa pembangunan dapat berlangsung sesuai

dengan rencana jangka panjang yang terumuskan dalam Tujuan, Kebijakan, dan Strategi-Strategi Penataan Ruang yang telah ditetapkan. Tujuan Penataan ruang wilayah Kabupaten Asmat adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan kebudayaan masyarakat zona ekologi lahan basah dataran rendah berbasis sektor pariwisata budaya dan alam sebagai sektor ekonomi unggulan, didukung oleh sektor kehutanan, perikanan dan kelautan. Dalam mendukung tercapainya Tujuan Penataan ruang wilayah tersebut, telah terumuskan berbagai kebijakan dan strategi penataan ruang yang diuraikan pada table berikut.

Tabel 2.7
Telaah RTRW Kabupaten Asmat Tahun 2021-2041

<i>Arah Kebijakan</i>	<i>Strategi</i>
a. Pengembangan pariwisata budaya dan alam sebagai sektor ekonomi unggulan, didukung oleh sektor kehutanan serta perikanan dan kelautan sebagai sektor ekonomi pendukung;	- Pengembangan pariwisata budaya dan alam sebagai sector ekonomi unggulan, didukung oleh sector kehutanan serta perikanan dan kelautan
b. Pengelolaan ekosistem lahan basah dataran rendah dan hutan sagu secara berkelanjutan;	- Pengelolaan ekosistem lahan basah dataran rendah dan hutan sagu secara berkelanjutan
c. Pengembangan manajemen resiko bencana;	- Pengembangan manajemen resiko bencana
d. Pemantapan peran pusat-pusat kegiatan wilayah sesuai dengan struktur dan hierarkinya dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama pertanian dan kawasan lindung;	- Pemantapan peran pusat-pusat kegiatan wilayah sesuai dengan struktur dan hirarkinya

<i>Arah Kebijakan</i>	<i>Strategi</i>
<p>e. Pengembangan sistem transportasi pendukung ekonomi dan pelayanan umum dengan tanpa mengakibatkan alih fungsi lahan utama</p> <p>pertanian dan kawasan lindung;</p> <p>f. Pengembangan sistem prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan merata;</p> <p>g. Mempertahankan kawasan lindung dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;</p> <p>h. Pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan;</p> <p>i. Pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan sosial budaya, dan daya dukung lingkungan hidup; dan</p> <p>j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.</p>	<p>b. Pengembangan sistem transportasi pendukung ekonomi dan pelayanan umum</p> <p>c. pengembangan sistem prasarana telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan merata</p> <p>d. pemantapan dan pengendalian fungsi kawasan lindung</p> <p>e. pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan</p> <p>f. pengembangan kawasan yang diprioritaskan untuk mendukung sektor ekonomi potensial, pengembangan sosial budaya, dan daya dukung lingkungan hidup</p> <p>g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara</p>

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Asmat Tahun 2021-2041

2.2.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan PD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas PUPRKP yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel

Teknik Menyimpulkan isu strategis Dinas PUPRKP

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Potensi sumber daya air	Akses air bersih yang terbatas	Pembangunan instalasi air bersih yang sesuai dengan kondisi lingkungan rawa belum optimal				Pembangunan instalasi air bersih yang sesuai dengan kondisi lingkungan rawa
Pembangunan jalan dan jembatan	Kondisi geografis yang sulit	Sebagian besar wilayah asmat berupa rawa dan sungai				Percepatan Pembangunan jalan dan jembatan
Potensi sektor pembangunan	Ketersediaan Perumahan dan	Banyak permukiman di Asmat yang berada di				Peningkatan Pembangunan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
perumahan dan kawasan permukiman	Permukiman layak belum maksimal	atas air dan dibangun secara tradisional				Perumahan dan Permukiman layak
Penataan Ruang	Perencanaan tata ruang yang belum komprehensif					Perencanaan tata ruang yang komprehensif

BAB 3

TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam mendukung visi dan misi pembangunan sesuai dengan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat melaksanakan misi empat yaitu :

"Meningkatan Pembangunan Infrastruktur"

Dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah;

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur :
 - a. Mewujudkan (Tata Kelola Pembangunan) Infrastruktur Yang Handal Melalui Pemerataan, Pengembangan Wilayah Dan Konektifitas.

3.1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025-2029

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra PD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab PD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Asmat tahun 2025-2029 dan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Asmat, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat meliputi, urusan Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas
 - a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata
 - b. Meningkatnya Ketersediaan Air Bersih yang Berkualitas dan Merata
 - c. Meningkatnya Ketersediaan Perumahan dan Permukiman yang layak
 - d. Meningkatnya Infrastruktur Jaringan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Tabel 3.1

Tujuan-Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Asmat

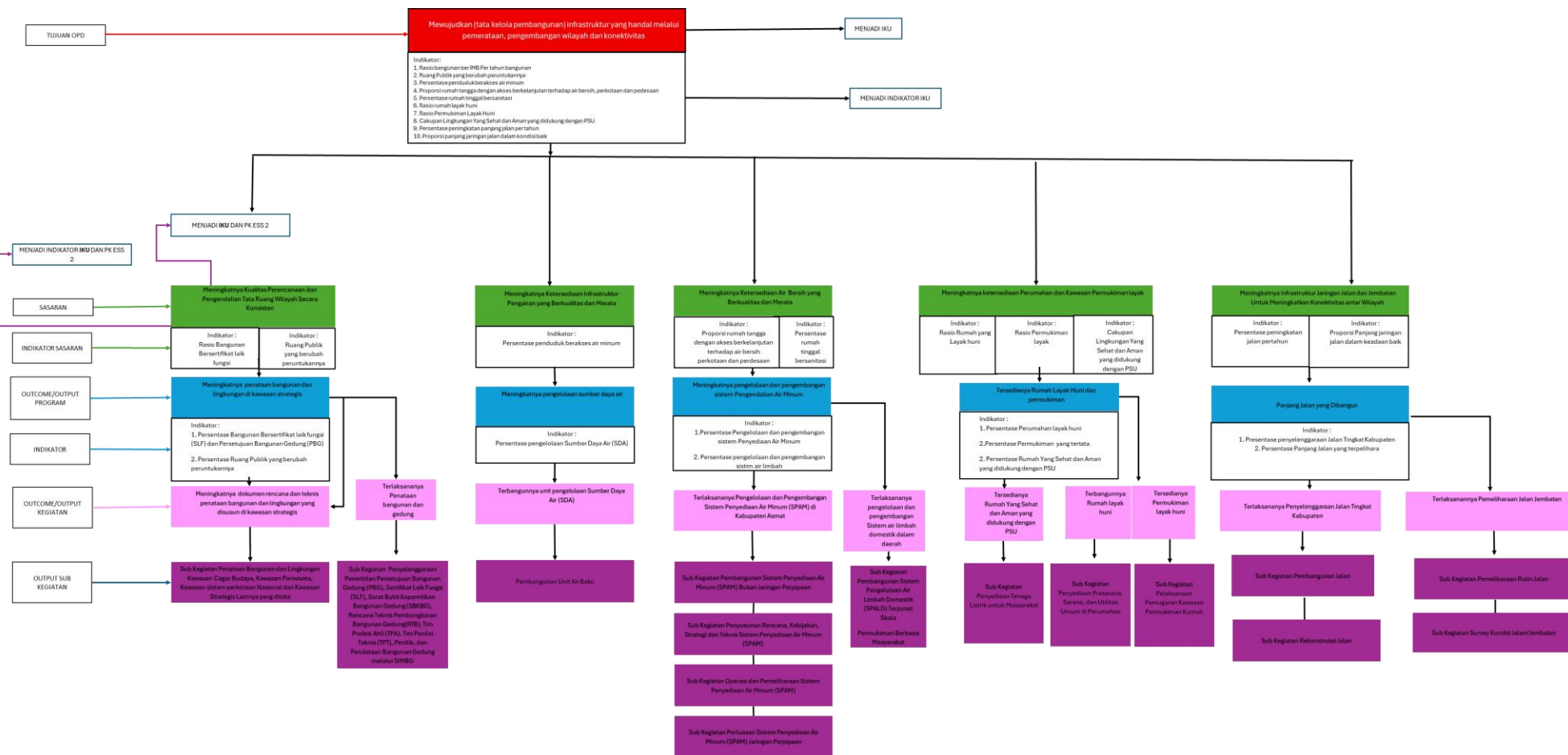
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SAT	BASE LINE 2024	INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya (Tata Kelola Pembangunan) infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tataat Ruang Wilayah secara konsisten	Rasio Bangunan Bersertifikat Layak Fungsi	%	76.00	10.50	12.50	13.50	17.50	21.50	24.50
		Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	%	18.05	12.50	13.50	15.00	17.50	18.00	19.50
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	14.68	14.50	15.50	15.80	17.20	17.50	19.50
		Rumah tangga dengan akses air minum aman	%	14.10	14.50	15.00	15.50	17.00	17.30	20.00
	Meningkatnya ketersediaan Sanitasi Aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	21.17	15.00	15.20	15.50	17.00	17.30	20.00
		Meningkatnya ketersediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	10.25	15.62	16.54	16.55	17.03	17.11
	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik		%	40.75	15.73	15.82	16.62	16.72	17.44	17.67
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU		%	14.65	16.38	16.52	16.61	16.63	16.67	17.19

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SAT	BASE LINE 2024	INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)								
	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap/ peningkatan jalan	%	92.33	10.50	12.50	15.50	17.50	21.50	22.50
		Tingkat Kemantapan Jalan	%	27.87	9.80	14.70	15.50	18.50	20.00	21.50

3.1.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Asmat, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Selaku Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pembangunan infrastruktur demi tercapainya pemenuhan kebutuhan Masyarakat dan Terwujudnya (Tata Kelola Pembangunan) infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana gambar berikut:

Gambar Cascading Kinerja



3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Asmat melakukan upaya untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai:

Tabel 3.2

Strategi dan Kebijakan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, sumberdaya aparatur dan tertib administrasi PD	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Penataan Layanan Perkantoran
			Peningkatan sarana dan Prasarana Pelayanan
		Meningkatkan Kapasitas sumber daya manusia aparatur	Peningkatan Kemampuan Teknis Fungsional Aparatur
		Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja PD	Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kinerja PD
2	Terwujudnya peningkatan kualitas Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah secara konsisten	Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan konsisten.	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung (HSBG)
			Penataan bangunan lingkungan

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
3	Terwujudnya peningkatan ketersediaan perumahan dan Kawasan permukiman layak huni	Meningkatkan ketersediaan perumahan dan Kawasan permukiman layak huni	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah dan Kawasan Permukiman terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar
4	Terwujudnya peningkatan ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata	Mengembangkan sarana infrastruktur pengairan yang memadai	Peningkatan/ pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur air bersih
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan perkotaan
			Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
5	Terwujudnya Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Meningkatkan Infrastruktur Jaringan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah	Pembangunan jalan, Rekonstruksi jalan yang menjadi akses ekonomi wilayah
			Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
			Meningkatkan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang sudah ada

BAB
4

***PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN***

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

4.1.1. Gambaran Umum Program dan Kegiatan

Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan selama lima tahun. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan, baik oleh satu atau beberapa instansi pemerintah, maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dan disusun berdasarkan tingkat urgencitas dan efektivitas pencapaian tujuan, sasaran, dan program. Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Operasionalisasi program diuraikan dalam berbagai kegiatan

Secara keseluruhan program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat dalam periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut;

1. PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Aset Tetap lainnya
- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku
- Kegiatan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
- Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

4.1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT

5. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

5.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMB
- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

6.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
- Penataan Bangunan dan Lingkungan

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

7.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Rekontruksi Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jalan

8. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

8.1 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota

- Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota
- Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP

4.1.2. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif

Uraian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selanjutnya ditampilkan pada tabel berikut ini;

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH
KABUPATEN ASMAT

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					121.998.030.813,00		126.412.695.004,00		129.934.123.531,00		133.570.972.296,00		136.332.732.485,00
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.349.337.993,00		19.179.271.792,00		21.092.198.971,00		23.096.418.868,00		24.201.060.755,00
Presentase Administrasi Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Presentase)	100	100	100	17.349.337.993,00	100	19.179.271.792,00	100	21.092.198.971,00	100	23.096.418.868,00	100	24.201.060.755,00
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.697.995.000,00		3.753.464.925,00		3.809.766.899,00		3.866.913.402,00		3.924.917.103,00
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi (Ha)	100	100	100	3.697.995.000,00	100	3.753.464.925,00	100	3.809.766.899,00	100	3.866.913.402,00	100	3.924.917.103,00
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	100	100	100		100		100		100			
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	100	100	100		100		100		100			
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					7.053.440.000,00		8.174.241.600,00		8.296.855.224,00		8.421.308.052,00		8.547.627.673,00

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	100	100	100	7.053.440.000,00	100	8.174.241.600,00	100	8.296.855.224,00	100	8.421.308.052,00	100	8.547.627.673,00
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					3.863.462.200,00		3.921.414.133,00		3.980.235.345,00		4.039.938.875,00		4.100.537.958,00
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	100	100	100	3.863.462.200,00	100	3.921.414.133,00	100	3.980.235.345,00	100	4.039.938.875,00	100	4.100.537.958,00
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN													
Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					5.871.825.620,00		5.959.903.004,00		6.049.301.549,00		6.140.041.073,00		6.232.141.689,00
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	100	5.871.825.620,00	100	5.959.903.004,00	100	6.049.301.549,00	100	6.140.041.073,00	100	6.232.141.689,00
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.835.650.000,00		1.863.184.750,00		1.891.132.521,00		1.919.499.509,00		1.948.292.002,00
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	100	1.835.650.000,00	100	1.863.184.750,00	100	1.891.132.521,00	100	1.919.499.509,00	100	1.948.292.002,00
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					82.326.320.000,00		83.561.214.800,00		84.814.633.022,00		86.086.852.517,00		87.378.155.305,00
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	100	100	100	82.326.320.000,00	100	83.561.214.800,00	100	84.814.633.022,00	100	86.086.852.517,00	100	87.378.155.305,00
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.356.050.886,00		10.356.050.886,00		10.356.050.886,00		10.356.050.886,00		10.356.050.886,00
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					6.790.550.886,00		6.790.550.886,00		6.790.550.886,00		6.790.550.886,00		6.790.550.886,00

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100	6.790.550.886,00	100	6.790.550.886,00	100	6.790.550.886,00	100	6.790.550.886,00	100	6.790.550.886,00
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	100		100		100		100		100	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	100	100	100	565.500.000,00	100	565.500.000,00	100	565.500.000,00	100	565.500.000,00	100	565.500.000,00
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00
TOTAL KESELURUHAN					132.354.081.699		136.768.745.890		140.290.174.417		143.927.023.182		146.688.783.371

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat ini merupakan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang sejalan dengan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Oleh sebab itu, komponen-komponen rencana strategis yang dituangkan harus mengacu pada arahan pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah yang teruang dalam RPJMD

Untuk melihat sejauh mana kontribusi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mendukung pencapaian visi dan misi jangka menengah daerah maka perlu disusun indikator-indikator yang relevan. Selanjutnya indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Asmat Tahun 2025-2029 ini ditampilkan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
- Berketahanan Energi, Air, Infrastruktur Konektivitas dan Kemandirian Pangan	Terwujudnya (tata kelola pembangunan) infrastruktur yang handal melalui pemerataan, pengembangan wilayah dan konektivitas				Rasio Bangunan Bersertifikat Layak Fungsi (Angka)		
					Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)		
					Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)		
					Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)		
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Amann (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIA TAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))		
					Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)		
					Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)		
					Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantapp (%)		
					Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)		
		Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Tataat Ruang Wilayah secara konsisten			Rasio Bangunan Bersertifikat Layak Fungsi (Angka)		
					Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua (Persentase)		
			Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung		Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
				Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pengairan yang berkualitas dan merata			Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%)		
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Irigasi		Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi (Ha)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
					Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	1.03.02.2.01.0107 - Pembangunan Unit Air Baku	
		Meningkatnya ketersediaan Air Bersih yang berkualitas dan merata			Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) (%)		
					Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Amann (%) (%)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	1.03.03.2.01.022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	
					Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1.03.03.2.01.025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
					Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1.03.03.2.01.029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
						dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	
		Meningkatnya ketersediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman layak			Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))		
					Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)		
					Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)		
			Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	
					Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	1.04.02 - PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	
				Tersedianya data penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1.04.02.2.01.002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	
					Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1.04.02.2.01.010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
				Tertindakannya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	1.04.02.2.03.008 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	1.04.02.2.03.011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	
				Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
					Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)	1.04.02.2.05.003 - Pembangunan Rumah Khusus	
			Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman		Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	1.04.03.2.02.008 - Penyusunan/ Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
				Tersedianya sumber daya listrik skala rumah tangga/individu	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik (Unit Rumah)	1.04.05.3.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
					Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik (Unit Rumah)	1.04.05.3.01.0006 - Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	
		Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan			Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantapp (%)		
					Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)		
			Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman		Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Tingkat Kabupaten	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
					Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
					Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan	
					Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
					Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat setiap Tahun Anggaran, menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah Indikator dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat di awal Tahun Anggaran.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3

INDIKATOR KINERJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	92,33	10,50	12,50	15,50	17,50	21,50	22,50
2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	21,17	0	5	10	15	20	25
3	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	Persentase	18,05	12,50	13,50	15,00	17,50	18,00	19,50
4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	10,25	15,62	16,54	16,55	17,03	17,11	17,15
5	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	27,87	9,80	14,70	15,50	18,50	20,00	21,50
6	Rasio Bangunan Bersertifikat Layak Fungsi	Angka	76,00	10,50	12,50	13,50	17,50	21,50	24,50
7	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	14,68	14,50	15,50	15,80	17,20	17,50	19,50
8	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persentase	40,75	15,73	15,82	16,62	16,72	17,44	17,67
9	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	14,10	14,50	15,00	15,50	17,00	17,30	20,00
10	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	14,65	16,38	16,52	16,61	16,63	16,67	17,19

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				121.998.030.813,00		126.412.695.004,00		129.934.123.531,00		133.570.972.296,00		136.332.732.485,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.349.337.993,00		19.179.271.792,00		21.092.198.971,00		23.096.418.868,00		24.201.060.755,00	
Presentase Administrasi Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Presentase)	100	100	17.349.337.993,00	100	19.179.271.792,00	100	21.092.198.971,00	100	23.096.418.868,00	100	24.201.060.755,00	
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.575.000,00		28.132.500,00		30.945.750,00		34.040.325,00		37.444.358,00	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	25.575.000,00	2	28.132.500,00		30.945.750,00	2	34.040.325,00	2	37.444.358,00	
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				25.575.000,00		28.132.500,00		30.945.750,00		34.040.325,00		37.444.358,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	25.575.000,00	2	28.132.500,00		30.945.750,00	2	34.040.325,00	2	37.444.358,00	
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.518.344.993,00		7.170.179.492,00		7.887.197.441,00		8.675.917.185,00		9.543.508.904,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	6.518.344.993,00	1	7.170.179.492,00		7.887.197.441,00	1	8.675.917.185,00	1	9.543.508.904,00	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1	1		1		1		1		1		
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.490.514.993,00		7.139.566.492,00		7.853.523.141,00		8.638.875.455,00		9.502.763.001,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1	1	6.490.514.993,00	1	7.139.566.492,00	1	7.853.523.141,00	1	8.638.875.455,00	1	9.502.763.001,00	
1.03.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				27.830.000,00		30.613.000,00		33.674.300,00		37.041.730,00		40.745.903,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	27.830.000,00	1	30.613.000,00		33.674.300,00	1	37.041.730,00	1	40.745.903,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				851.103.000,00		936.213.300,00		1.029.834.630,00		1.132.818.093,00		1.246.099.902,00	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	851.103.000,00	1	936.213.300,00	1	1.029.834.630,00	1	1.132.818.093,00	1	1.246.099.902,00	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	33	33		33		33		33				
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				174.790.000,00		192.269.000,00		211.495.900,00		232.645.490,00		255.910.039,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	174.790.000,00	3	192.269.000,00		211.495.900,00	3	232.645.490,00	3	255.910.039,00	
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				35.013.000,00		38.514.300,00		42.365.730,00		46.602.303,00		51.262.533,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	35.013.000,00	1	38.514.300,00	1	42.365.730,00	1	46.602.303,00	1	51.262.533,00	
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				641.300.000,00		705.430.000,00		775.973.000,00		853.570.300,00		938.927.330,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	33	33	641.300.000,00	33	705.430.000,00	33	775.973.000,00	33	853.570.300,00	33	938.927.330,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				9.134.750.000,00		10.148.225.000,00		11.163.047.500,00		12.179.352.250,00		12.197.287.475,00	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	9.134.750.000,00	1	10.148.225.000,00	1	11.163.047.500,00	1	12.179.352.250,00	1	12.197.287.475,00	
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	8		8		8		8		8		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				90.750.000,00		99.825.000,00		109.807.500,00		120.788.250,00		132.867.075,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	2	90.750.000,00	2	99.825.000,00	2	109.807.500,00	2	120.788.250,00	2	132.867.075,00	
1.03.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				44.000.000,00		48.400.000,00		53.240.000,00		58.564.000,00		64.420.400,00	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	8	44.000.000,00	8	48.400.000,00	8	53.240.000,00	8	58.564.000,00	8	64.420.400,00	
1.03.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				9.000.000.000,00		10.000.000.000,00		11.000.000.000,00		12.000.000.000,00		12.000.000.000,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	9.000.000.000,00	1	10.000.000.000,00	1	11.000.000.000,00	1	12.000.000.000,00	1	12.000.000.000,00	
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				719.565.000,00		791.521.500,00		870.673.650,00		957.741.015,00		1.053.515.116,00	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	719.565.000,00	3	791.521.500,00	3	870.673.650,00	3	957.741.015,00	3	1.053.515.116,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				102.784.000,00		113.062.400,00		124.368.640,00		136.805.504,00		150.486.054,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	3	102.784.000,00	3	113.062.400,00	3	124.368.640,00	3	136.805.504,00	3	150.486.054,00	
1.03.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				616.781.000,00		678.459.100,00		746.305.010,00		820.935.511,00		903.029.062,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	616.781.000,00	1	678.459.100,00	1	746.305.010,00	1	820.935.511,00	1	903.029.062,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.000.000,00		105.000.000,00		110.500.000,00		116.550.000,00		123.205.000,00	
Meningkatnya Kualitas Administrasi Penunjang Urusan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	100.000.000,00	2	105.000.000,00		110.500.000,00	2	116.550.000,00	2	123.205.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00		60.500.000,00	2	66.550.000,00	2	73.205.000,00	
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				3.697.995.000,00		3.753.464.925,00		3.809.766.899,00		3.866.913.402,00		3.924.917.103,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	100	100	3.697.995.000,0 ₀	100	3.753.464.925,00	100	3.809.766.899,0 ₀	100	3.866.913.402,0 ₀	100	3.924.917.103,0 ₀	
	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi (Ha)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob (Persentase)	100	100		100		100		100		100		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.697.995.000,0 ₀		3.753.464.925,00		3.809.766.899,0 ₀		3.866.913.402,0 ₀		3.924.917.103,0 ₀	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	1	1	3.697.995.000,0 ₀	1	3.753.464.925,00	1	3.809.766.899,0 ₀	1	3.866.913.402,0 ₀	1	3.924.917.103,0 ₀	
1.03.02.2.01.0107 - Pembangunan Unit Air Baku				3.697.995.000,0 ₀		3.753.464.925,00		3.809.766.899,0 ₀		3.866.913.402,0 ₀		3.924.917.103,0 ₀	
Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	1	1	3.697.995.000,0 ₀	1	3.753.464.925,00	1	3.809.766.899,0 ₀	1	3.866.913.402,0 ₀	1	3.924.917.103,0 ₀	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				7.053.440.000,0 ₀		8.174.241.600,00		8.296.855.224,0 ₀		8.421.308.052,0 ₀		8.547.627.673,0 ₀	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota (Persentase)	100	100	7.053.440.000,0 ₀	100	8.174.241.600,00	100	8.296.855.224,0 ₀	100	8.421.308.052,0 ₀	100	8.547.627.673,0 ₀	
1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				7.053.440.000,0 ₀		8.174.241.600,00		8.296.855.224,0 ₀		8.421.308.052,0 ₀		8.547.627.673,0 ₀	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1	7.053.440.000,0 ₀		8.174.241.600,00	1	8.296.855.224,0 ₀	1	8.421.308.052,0 ₀	1	8.547.627.673,0 ₀	
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	5	5		5		5		5		5		
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				4.315.340.000,0 ₀		5.315.340.000,00		5.315.340.000,0 ₀		5.315.340.000,0 ₀		5.315.340.000,0 ₀	
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	5	5	4.315.340.000,0 ₀	5	5.315.340.000,00	5	5.315.340.000,0 ₀	5	5.315.340.000,0 ₀	5	5.315.340.000,0 ₀	
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	

**RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	5	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	
1.03.03.2.01.0029 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				2.238.100.000,00		2.358.901.600,00		2.481.515.224,00		2.605.968.052,00		2.732.287.673,00	
Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1	1	2.238.100.000,00		2.358.901.600,00	1	2.481.515.224,00	1	2.605.968.052,00	1	2.732.287.673,00	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				3.863.462.200,00		3.921.414.133,00		3.980.235.345,00		4.039.938.875,00		4.100.537.958,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	100	100	3.863.462.200,00	100	3.921.414.133,00	100	3.980.235.345,00	100	4.039.938.875,00	100	4.100.537.958,00	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				3.863.462.200,00		3.921.414.133,00		3.980.235.345,00		4.039.938.875,00		4.100.537.958,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	61	63	3.863.462.200,00	64	3.921.414.133,00	66	3.980.235.345,00	67	4.039.938.875,00	68	4.100.537.958,00	
1.03.05.2.01.0023 - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				3.863.462.200,00		3.921.414.133,00		3.980.235.345,00		4.039.938.875,00		4.100.537.958,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun (M ³ /Hari)	61	63	3.863.462.200,0	64	3.921.414.133,00	66	3.980.235.345,0	67	4.039.938.875,0	68	4.100.537.958,0	
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				0		0		0		0		0	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Perumahan dan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				5.871.825.620,0		5.959.903.004,00		6.049.301.549,0		6.140.041.073,0		6.232.141.689,0	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	100	100	5.871.825.620,0	100	5.959.903.004,00	100	6.049.301.549,0	100	6.140.041.073,0	100	6.232.141.689,0	
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				5.871.825.620,0		5.959.903.004,00		6.049.301.549,0		6.140.041.073,0		6.232.141.689,0	
Meningkatnya Kualitas Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	5	5	5.871.825.620,0	5	5.959.903.004,00	5	6.049.301.549,0	5	6.140.041.073,0	5	6.232.141.689,0	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				5.871.825.620,0 0		5.959.903.004,00		6.049.301.549,0 0		6.140.041.073,0 0		6.232.141.689,0 0	
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	5	5	5.871.825.620,0 0	5	5.959.903.004,00	5	6.049.301.549,0 0	5	6.140.041.073,0 0	5	6.232.141.689,0 0	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				1.835.650.000,0 0		1.863.184.750,00		1.891.132.521,0 0		1.919.499.509,0 0		1.948.292.002,0 0	
Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	100	100	1.835.650.000,0 0	100	1.863.184.750,00	100	1.891.132.521,0 0	100	1.919.499.509,0 0	100	1.948.292.002,0 0	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				1.835.650.000,0 0		1.863.184.750,00		1.891.132.521,0 0		1.919.499.509,0 0		1.948.292.002,0 0	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1	1.835.650.000,00	1	1.863.184.750,00	1	1.891.132.521,00	1	1.919.499.509,00	1	1.948.292.002,00	
	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
1.03.09.2.01.0010 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1.000.449.560,00		1.000.449.560,00		1.000.449.560,00		1.000.449.560,00		1.000.449.560,00	
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	1.000.449.560,00	2	1.000.449.560,00	2	1.000.449.560,00	2	1.000.449.560,00	2	1.000.449.560,00	
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				835.200.440,00		862.735.190,00		890.682.961,00		919.049.949,00		947.842.442,00	
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	1	1	835.200.440,00	1	862.735.190,00	1	890.682.961,00	1	919.049.949,00	1	947.842.442,00	
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				82.326.320.000,00		83.561.214.800,00		84.814.633.022,00		86.086.852.517,00		87.378.155.305,00	
Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	100	100	82.326.320.000,00	100	83.561.214.800,00	100	84.814.633.022,00	100	86.086.852.517,00	100	87.378.155.305,00	
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				82.326.320.000,00		83.561.214.800,00		84.814.633.022,00		86.086.852.517,00		87.378.155.305,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Tingkat Kabupaten	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	2,5	2,5	82.326.320.000,00	2,5	83.561.214.800,00	2,5	84.814.633.022,00	2,5	86.086.852.517,00	2,5	87.378.155.305,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERAN GAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	2,5	2,5	500.000.000,00	2,5	500.000.000,00	2,5	500.000.000,00	2,5	500.000.000,00	2,5	500.000.000,00	
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00		2.750.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	2,5	2,5	2.750.000.000,00	2,5	2.750.000.000,00	2,5	2.750.000.000,00	2,5	2.750.000.000,00	2,5	2.750.000.000,00	
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				36.834.702.000,00		38.069.596.800,00		39.323.015.022,00		40.595.234.517,00		41.886.537.305,00	
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	2,5	2,5	36.834.702.000,00	2,5	38.069.596.800,00	2,5	39.323.015.022,00	2,5	40.595.234.517,00	2,5	41.886.537.305,00	
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				42.241.618.000,00		42.241.618.000,00		42.241.618.000,00		42.241.618.000,00		42.241.618.000,00	
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2,5	2,5	42.241.618.000,00	2,5	42.241.618.000,00	2,5	42.241.618.000,00	2,5	42.241.618.000,00	2,5	42.241.618.000,00	
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				10.356.050.886,00		10.356.050.886,00		10.356.050.886,00		10.356.050.886,00		10.356.050.886,00	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				6.790.550.886,00		6.790.550.886,00		6.790.550.886,00		6.790.550.886,00		6.790.550.886,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terpenuhinya Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	100	100	6.790.550.886,00	100	6.790.550.886,00	100	6.790.550.886,00	100	6.790.550.886,00	100	6.790.550.886,00	
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100		100		100		100		100		
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				240.550.886,00		240.550.886,00		240.550.886,00		240.550.886,00		240.550.886,00	
Tersedianya data penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0	240.550.886,00	0	240.550.886,00	0	240.550.886,00	0	240.550.886,00		240.550.886,00	
	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1		0		1		1		1		
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1	1	0,00	0	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				240.550.886,00		240.550.886,00		240.550.886,00		240.550.886,00		240.550.886,00	
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	0	0	240.550.886,00	0	240.550.886,00	0	240.550.886,00	0	240.550.886,00		240.550.886,00	
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				4.900.000.000,0 0		4.900.000.000,00		4.900.000.000,0 0		4.900.000.000,0 0		4.900.000.000,0 0	
Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	50	50	4.900.000.000,0 0	50	4.900.000.000,00	50	4.900.000.000,0 0	50	4.900.000.000,0 0	50	4.900.000.000,0 0	
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)												
	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	75	75		75		75		75		75		
1.04.02.2.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

**RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	50	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	50	0,00	
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)			450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				4.450.000.000,00		4.450.000.000,00		4.450.000.000,00		4.450.000.000,00		4.450.000.000,00	
Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	75	75	4.450.000.000,00	75	4.450.000.000,00	75	4.450.000.000,00	75	4.450.000.000,00	75	4.450.000.000,00	
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00	
Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Warga Negara Korban Bencana dan Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)			1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00	
1.04.02.2.05.0003 - Pembangunan Rumah Khusus				1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun (Unit)			1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00		1.650.000.000,00	
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani (%)	100	100	565.500.000,00	100	565.500.000,00	100	565.500.000,00	100	565.500.000,00	100	565.500.000,00	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)			565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00	
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00	
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)			565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00		565.500.000,00	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00	
Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	100	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	

RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM , PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025 - 2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				2.000.000.000,0		2.000.000.000,00		2.000.000.000,0		2.000.000.000,0		2.000.000.000,0	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	10	10	2.000.000.000,0	10	2.000.000.000,00	10	2.000.000.000,0	10	2.000.000.000,0	10	2.000.000.000,0	
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				2.000.000.000,0		2.000.000.000,00		2.000.000.000,0		2.000.000.000,0		2.000.000.000,0	
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	10	10	2.000.000.000,0	10	2.000.000.000,00	10	2.000.000.000,0	10	2.000.000.000,0	10	2.000.000.000,0	
1.04.05.3.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				1.000.000.000,0		1.000.000.000,00		1.000.000.000,0		1.000.000.000,0		1.000.000.000,0	
Tersedianya sumber daya listrik skala rumah tangga/individu	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik (Unit Rumah)			1.000.000.000,0		1.000.000.000,00		1.000.000.000,0		1.000.000.000,0		1.000.000.000,0	
1.04.05.3.01.0006 - Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat				1.000.000.000,0		1.000.000.000,00		1.000.000.000,0		1.000.000.000,0		1.000.000.000,0	
Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik (Unit Rumah)			1.000.000.000,0		1.000.000.000,00		1.000.000.000,0		1.000.000.000,0		1.000.000.000,0	

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung
PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya Aksebilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah alat penting bagi perangkat daerah untuk mengukur dan mengelola kinerja dalam melaksanakan urusan pemerintah. IKK digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisien dalam pencapaian tujuan Pembangunan daerah.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5
TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	1.03.1.04.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
2.	Rasio Bangunan Bersertifikat Layak Fungsi	Angka	76,00	10,50	12,50	13,50	17,50	21,50	24,50	
3.	Rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau danberkelanjutan (%)	%	10,25	15,62	16,54	16,55	17,03	17,11	17,15	
4.	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	92,33	10,50	12,50	15,50	17,50	21,50	22,50	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.	Kapasitas Air Baku	(%)	14,68	14,50	15,50	15,80	17,20	17,50	19,50	
6.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Amann	%	21,17	15,00	15,20	15,50	17,00	17,30	20,00	
7.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaann	%	14,68	14,50	15,50	15,80	17,20	17,50	19,50	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

PEMERINTAH KABUPATEN ASMAT

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
2.	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua	positif	Persentase	18,05	12,50	13,50	15,00	17,50	18,00	19,50	
3.	Rasio Bangunan Bersertifikat Layak Fungsi	positif	Angka	76,00	10,50	12,50	13,50	17,50	21,50	24,50	
4.	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	positif	%	14,10	14,50	15,00	15,50	17,00	17,30	20,00	
5.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	positif	(%)	21,17	0	5	10	15	20	25	
6.	Tingkat Kemantapan Jalan	positif	Persentase	27,87	9,80	14,70	15,50	18,50	20,00	21,50	
7.	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	positif	%	92,33	10,50	12,50	15,50	17,50	21,50	22,50	
8.	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	positif	%	14,68	14,50	15,50	15,80	17,20	17,50	19,50	
9.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
10.	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	positif	Persentase	40,75	15,73	15,82	16,62	16,72	17,44	17,67	
11.	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	positif	Persentase	14,65	16,38	16,52	16,61	16,63	16,67	17,19	
12.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	positif	(%)	10,25	15,62	16,54	16,55	17,03	17,11	17,15	

4.2.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 dimana daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Asmat menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- hari	Jumlah rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Rumah Tangga	186	189	192	195	199	201
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rumah Tangga	62	63	64	66	67	68

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang direhabilitasi/ dibangun	Rumah	0	0	0	0	0	0
4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat	Jumlah rumah yang direlokasi	Rumah	55	60	62	62	64	68

4.2.4 Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals merupakan komitmen Bersama yang komperhensif. Tujuan yang ditekankan tidak hanya pada outcome dari Pembangunan yang berakhir pada peningkatan kesejahteraan saja, tetapi aspek keadilan, inklusivitas serta cara dalam mencapai tujuan juga merupakan hal yang ditekankan.

Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.8

Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals bidang Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sat	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pengolahan Air Bersih yang Berkelanjutan untuk semua	%	14,5	15	15,5	18	17,5	19,5
2.	Sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	%	15	15,2	15,5	17	17,3	20

BAB

5

PENUTUP

Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asmat tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tatacara RPJPD RPJMD dan RKPD. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Asmat tahun 2025-2029 dalam hal ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat tahun 2025-2029 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat tahun 2025-2029 Serta sebagai suatu wujud perencanaan tanggungjawab atas pelaksanaan program dan kegiatan yang harus dicapai melalui program prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Daerah selama 5 (lima) Tahun. Dalam penyusunan RENSTRA PD ditentukan pula target-target program, kegiatan, sub kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Asmat yaitu: "TERWUJUDNYA MASYARAKAT ASMAT YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA".

Selanjutnya Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, tidak terlepas dari peran aktif, sikap, mental dan tekad yang disertai semangat

disiplin dalam meningkatkan kinerja. Dalam perspektif tersebut harus dapat ditunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai satu instansi yang dapat bekerja secara profesional dan terpercaya dalam Pelayanannya.